



## Keterlibatan Agama Dalam Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Antara Perlindungan Hak Asasi dan Penguatan Moderasi Beragama

Aulia Safitri<sup>1</sup>, Annisa Meilyani<sup>2</sup>, Nama Elma Astutie<sup>3</sup>,  
Marisa Shermia Nandha<sup>4</sup>

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alamat: Jl. George Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya

Korespondensi penulis: [auliasafitri.as82@gmail.com](mailto:auliasafitri.as82@gmail.com)

---

### Article History:

Received: Mei 08, 2024;

Accepted: Juni 04, 2024;

Published: Juni 30, 2024;

**Keywords:** Role of religion,  
Sensitive, Human rights, Religious  
moderation.

**Abstract:** *In the context of public policy formation, the role of religion becomes a complex and sensitive subject. This article delves deeper into the dynamics of religion's involvement in the process of shaping public policy, particularly in the context of protecting human rights and strengthening religious moderation. The research identifies that although religion often serves as a source of values and principles in policy formation, tensions between protecting individual human rights and reinforcing moderate religious values often arise. Through literature analysis and case studies, this article attempts to elucidate how religion's involvement affects the policy formation process, both directly and indirectly, and its impact on society. By understanding this complexity, it is hoped that pathways can be opened for finding solutions that strengthen diversity, respect human rights, and promote moderation in the context of public policies related to religion..*

---

### Abstrak

Dalam konteks pembentukan kebijakan publik, peran agama menjadi subjek yang kompleks dan sensitif. Artikel ini menggali lebih dalam tentang dinamika keterlibatan agama dalam proses pembentukan kebijakan publik, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi dan penguatan moderasi beragama. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun agama sering kali menjadi sumber nilai dan prinsip dalam pembentukan kebijakan, tegangan antara perlindungan hak asasi individu dan penguatan nilai-nilai agama yang moderat sering muncul. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan agama memengaruhi proses pembentukan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami kompleksitas ini, diharapkan dapat terbuka jalan bagi penemuan solusi yang memperkuat keberagaman, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan moderasi dalam konteks kebijakan publik yang berkaitan dengan agama.

**Kata Kunci:** Peran agama, Sensitif, Hak asasi manusia, Moderasi beragama

### LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan kemajuan dan pluralitas yang sangat kompleks, kemajemukan ini membentang dengan gagahnya dari sabang sampai marauke. Atas dasar inilah Indonesia memiliki kekayaan suku, agama, Bahasa dan adat istiadat budaya, perbedaan identitas tersebut bukanlah sesuatu yang harus dibedakan namun seharusnya bisa menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa sikap persatuan tanpa memandang agama dan multikultural adalah kunci melawan cengkraman musuh serta Berjaya membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka jika diwarnai lebih mendalam maka agama

merupakan elemen dari unsur budaya atau bisa dimaknai bahwa budaya juga merupakan elemen dari agama. Ini telah lama ada di sebagian besar lapisan masyarakat (Khoiruddin,2016). Hal ini seringkali menimbulkan penafsiran yang terpecah menjadi beberapa bagian ketika menempatkan agama didalam ruang kehidupan sehari-hari. Secara umum, Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman (Akhmadi, 2019). Indonesia memiliki keanekaragaman bahasa, suku, ras, budaya, dan agama (Warsah ,2017), Keanekaragaman budaya Indonesia menunjukkan bahwa keragaman merupakan kekuatan yang memperkaya kehidupan di Indonesia dan memperkuat masyarakat (Syahputra, 2019). Namun, ia juga dapat menyebabkan pergeseran dalam agama, ras, budaya, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya (Ulya & Anshori, 2016).

Peran agama dalam proses pembentukan kebijakan publik telah menjadi subjek diskusi yang semakin relevan dan kompleks dalam konteks masyarakat yang semakin pluralistik. Dalam era globalisasi dan diversifikasi budaya, agama tetap memegang peranan penting dalam membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun, bagaimana agama seharusnya terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik masih menjadi sumber kontroversi, terutama ketika bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konsep moderasi beragama. Pentingnya memahami peran agama dalam kebijakan publik terletak pada pengakuan akan pengaruhnya yang besar terhadap pandangan masyarakat dan tata nilai yang mendasari sebuah negara. Agama tidak hanya merupakan aspek dari kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi tindakan kolektif dan pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari keterlibatan agama dalam proses kebijakan publik, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi individu dan promosi moderasi beragama.

Dalam konteks perlindungan hak asasi, keterlibatan agama dalam pembentukan kebijakan publik sering kali menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebebasan beragama dapat dijamin tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Misalnya, dalam konteks kebijakan kesehatan reproduksi, pandangan agama tertentu mungkin bertentangan dengan hak reproduksi wanita seperti akses terhadap kontrasepsi atau layanan aborsi. Oleh karena itu, dilema etis muncul antara kebebasan beragama dan hak-hak reproduksi yang dijamin oleh hukum. Di sisi lain, keterlibatan agama juga dapat menjadi sumber penguatan moderasi beragama jika diarahkan dengan tepat. Moderasi beragama adalah konsep yang mendorong dialog antaragama, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam pembentukan kebijakan publik, pemerintahan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian sosial dan

koeksistensi yang harmonis ditengah masyarakat yang beragama. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam dinamika keterlibatan agama dalam proses pembentukan kebijakan publik, dengan fokus pada perdebatan anatara perlindungan hak asasi individu dan penguatan moderasi beragama. Dengan memahami kerangka kerja ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan antara kebebasan beragama dan prinsip – prinsip moderasi dalam pembentukan kebijakan publik

Indoonesia menjadi salah satu negara dengan keanekaragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang besar yang tiada tandingannya didunia, adanya fakta beragamanya masyarakat indonesia memunculkan konsekuensi betapa beragam pula pendapat, pandangan, keyakinan, dan berbagai kepentingan setiap individu dimasyarakat. Berbagai upaya dilakukan sebagaimanaantisipasi perpecahan akibat keragaman ini. Salah satunya adanya bahasa persatuan yaitu bahasa indonesia yang dapat menjadi sarana komunikasi dari masyarakat dapat menjadi sarana komunikasi dari masyarakat dengan berbagai keyakinan yang berbeda, sehingga antar individu dalam masyarakat dapat saling memahami satu sama lain. Namun, pengelolaan keragaman yang salah dapat menyebabkan masalah (Ni Wayan Apriani & Ni Komang Aryan, 2022) Keberagaman adalah sebuah keniscayaan di dunia ini; dalam agama, keberagaman adalah sunnatullah, sehingga tidak dapat dihindari. Selain itu, pendidikan Islam yang moderat dan inklusif adalah cara terbaik untuk mengontrol masyarakat majemuk agar tidak ada radikalisme atau konflik kelompok (Ahmad Zainur Fahri Mohamad, 2022).

Identitas negara adalah anugrah yang tak ternilai harganya. Namun, seperti pisau bermata dua, kemajemukan Indonesia adalah kekayaan dan keunikan. Sebaliknya, keragaman ini menjadi bumerang dan menantang Indonesia. Jika Indonesia tidak dapat menegakkan prinsip toleransi yang tinggi di tengah-tengah populasi multikulturalnya, ini akan menyebabkan ketidaksepakatan dan konflik di masa depan (Syamsuddin, 2018).

Tidak seperti pergeseran yang menyebabkan konflik dalam kehidupan nyata karena kurangnya pemahaman akan kemajemukan, tingginya berburuk sangka, dan kurangnya rasa toleransi dalam kehidupan sehari-hari (Hartono, 2011). Untuk menyadarkan masyarakat tentang keberagaman (multiculture) ini bukanlah tugas yang mudah; pada kenyataannya, kesadaran yang mendominasi masyarakat saat ini adalah kesadaran yang bersifat segmental. Oleh karena itu, menjadi sadar akan fakta kemajemukan dan pluralitas bangsa sangat penting (Munadlir, 2016). Sampai saat ini, menanamkan sikap dan pemikiran yang berbasis Bhineka Tunggal Ika masih menjadi tantangan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa implementasi kebhinekaan ini seringkali bertentangan dengan berbagai macam kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan agama masih merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan di Indonesia (Rifa'i, 2017). Konflik agama menjadi salah satu fenomena modern di Indonesia. Di mana kurangnya kesadaran akan perbedaan agama dan toleransi masih terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ini seharusnya sudah menjadi bagian dari kesadaran akan konsekuensi keberagaman di masyarakat Indonesia (Aris Shofa, 2016). Pada penelitian Fanindi dan Mupida, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kelompok radikalisme dengan media sosial (Fanindy & Mupida, 2021). Bahkan menurut Imam Fauzi Ghifari, menyatakan terdapat beberapa kelompok radikal memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan faham dan propaganda ekstrimis (Ghifari, 2017).

Studi menunjukkan bahwa media sosial dan kelompok radikal saling berhubungan dan bahkan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pemahaman ekstrem. Selanjutnya, glokalisasi kurikulum PAI di Madrasah Aliyah Keagamaan telah diselesaikan oleh Heny Kusmawati dan Anista Ika (Kusmawati & Surachman, 2019).

Dengan demikian, pendidikan agama Islam dianggap dapat meningkatkan daya tahan budaya lokal, menurut Ali et al. (2019), Selain itu, keberagaman dapat ditingkatkan dengan menanamkan nilai kearifan lokal ini (Affandy, 2017) Suatu intervensi diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut karena kompleksitasnya. Ada kemungkinan bahwa alasan di balik ini akan menyebabkan moral rakyat Indonesia terus mengalami penurunan atau degradasi (Ma'rufah et al., 2020). Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa generasi bangsa saat ini rentan terhadap radikalisme (Fanindy & Mupida, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, masyarakat Indonesia harus menggunakan cara berpikir yang lebih toleran dan akomodatif. Ini akan membantu menghindari konflik kelompok dan budaya serta sikap fanatik terhadap golongannya sendiri. Karena itu, keberagaman tidak dianggap sebagai ancaman atau sumber perpecahan bangsa.

## **KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara dalam proses pembentukan kebijakan publik antara perlindungan hak asasi dan penguatan moderasi beragama. melalui penguatan

aspek agama dan perlindungan hak asasi Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang membandingkan hasil penelitian sebelumnya dengan konsep yang ingin dikembangkan. Pendekatan ini melibatkan telaah pustaka untuk mencari data relevan, langkah-langkah penelitian mencakup pengamatan fenomena, hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Islam, dan nilai-nilai lokal, serta penyelesaian dan kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tulisan atau referensi untuk mendorong moderasi beragama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Moderasi dalam Keberagaman Masyarakat**

Dalam masyarakat Indonesia yang multibudaya, sikap keberagaman yang eksklusif yang hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara sepihak, tentu dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama. Konflik keagamaan yang banyak terjadi di Indonesia, umumnya dipicu adanya sikap keberagaman yang eksklusif, serta adanya kontestasi antar kelompok agama dalam meraih dukungan umat yang tidak dilandasi sikap toleran, karena masing-masing menggunakan kekuatannya untuk menang sehingga memicu konflik. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali kemampuan akal/ nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan konservatif. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok liberal, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam

skala mikro maupun makro, keluarga (privat) maupun negara (publik).

## **2. Keterlibatan Agama**

Keterlibatan agama dalam pembentukan kebijakan publik sering kali menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan hak-hak individu lainnya. Terlalu banyak pengaruh agama dapat mengancam kebebasan beragama individu yang berbeda keyakinan atau non-agamis. Keterlibatan agama dalam proses pembentukan kebijakan publik memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteksnya. Meskipun terdapat risiko perlindungan hak asasi yang terancam oleh keterlibatan agama yang berlebihan, ada juga potensi untuk memperkuat moderasi beragama dan mempromosikan toleransi antar agama. Karena itu, sangat penting bagi negara-negara untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan hak asasi individu dan kebutuhan untuk memperkuat moderasi beragama demi mencapai masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Berdasarkan hasil dari pengamatan menggunakan media sosial yang dilakukan oleh mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya ditemukan bahwa adanya keterlibatan agama dalam pembentukan kebijakan publik sering kali mengarah pada potensi pelanggaran terhadap hak asasi individu. Adanya diskriminasi terhadap minoritas agama yang dilakukan oleh mayoritas agama adanya ketidaksetaraan antara perlindungan hak asasi dan bebas beragama. Namun, hasil dapat disebut berbeda jika berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya terhadap masyarakat dilingkungan sekitar yang menyatakan keterlibatan agama dalam proses pembentukan kebijakan publik tergantung dengan situasi atau keadaan. Dimana jika suatu kebijakan terbentuk dalam lingkungan yang memiliki pengaruh mayoritas yang sangat tinggi maka keterlibatan pengaruh agama akan diberlakukan, hal akan berbeda jika terjadi di ruang publik dimana minoritas dan mayoritas seimbang maka kebijakan publik akan mengikuti pengaruh secara umum. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul tentang sejauh mana agama harus memainkan peran dalam kebijakan publik. Berdasarkan penelusuran data menunjukkan bahwa keterlibatan terlalu banyak pengaruh agama dalam kebijakan dapat mengancam kebebasan beragama individu yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas agama.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari pembahasan di atas menyoroti kompleksitas peran agama dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia. Meskipun agama memiliki pengaruh yang

signifikan dalam membentuk norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat, tegangan seringkali muncul antara perlindungan hakasi individu dan penguatan moderasi beragama. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pentingnya menemukan keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip moderasi beragama sangatlah vital. Dibutuhkan strategi yang cermat dan sensitif dalam memasukkan nilai-nilai agama ke dalam kebijakan publik tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Moderasi beragama menjadi kunci dalam memfasilitasi dialog antaragama, meningkatkan toleransi, dan menghormati keberagaman keyakinan. Selain itu, komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip dasar negara seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 menjadi landasan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang inklusif dan harmonis. Metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, membantu dalam mengeksplorasi dinamika kompleks antara perlindungan hak asasi dan penguatan moderasi beragama dalam konteks pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, pemahaman yang lebih dalam tentang peran agama dalam kebijakan publik diharapkan dapat membuka jalan menuju solusi-solusi yang memperkuat keragaman, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan moderasi dalam masyarakat yang semakin pluralistik.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Affandy, S. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagaman Peserta Didik. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2(1).
- Ahmad Zainur Fahri Mohamad. (2022). Moderasi Beragama di Indonesia. *Religions*, 13(5), 451.
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45-55.
- Ali, M., Wahyudi, D., & Surti, M. (2019). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal Indonesia di Era Global. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 03(2), 159–177.
- Aris Shofa, A. M. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 34–41.
- Fanindy, M. N., & Mupida, S. (2021). The Shift of Literacy Among Millennials as the Result of Radicalism Spreading in Social Media. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 20(2), 195–222.
- Ghifari, I. F. (2017). Radikalisme di Internet. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(2), 123.
- Hartono, Y. (2011). Pembelajaran Yang Multikultural Untuk Membangun Karakter Bangsa. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 1(1), 29–45.

- Kusmawati, H., & Surachman, A. I. (2019). Glokalisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Keagamaan Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 6(2), 98.
- Ma'rufah, N., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 191–201.
- Mukhibat, M., Ainul Nurhidayati Istiqomah, & Nurul Hidayah. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 4(1), 73-88.
- Munadlir. (2016). Strategi Sekolah dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(1), 116–129.
- Ni Wayan Apriani, & Ni Komang Aryani. (2022). Moderasi Beragama. *Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra*, 12(1), 34–45.
- Rifa'i, A. (2017). Dealektika Pemikiran dalam Dialog Antar Umat Beragama: Studi Kasus Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(1), 75.
- Salim, Arhanuddin, et al. (2023). Moderasi Beragama: Implementasi dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal.
- Syahputra, M. C. (2018). Pendidikan Islam Multikultural (Studi Komparasi Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syamsuddin, M. (2018). Gerakan Muhammadiyah Dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme: Sebuah Landasan Normatif-Institusional. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 1(2), 361.